

Learning Policy Model for Vocational Higher Education after the Covid-19 Pandemic

Romy Hermawan¹, M.Daniel Septian², Hayat³

DOI: 10.35445/alishlah.v13i3.1220

Article Info**Abstract**

Keywords:
Incremental Model;
Learning Policy;
Vocational Education

Kata kunci:
Model Inkremental;
Kebijakan
Pembelajaran;
Pendidikan Vokasi

This study aims to describe and analyze the learning policy model in vocational higher education after the Covid-19 pandemic. The challenge for future learning policies is to be able to adapt new habits in the typical vocational higher education learning process with applied technology based on skills and competencies by prioritizing health and safety, especially for the academic community. This research design uses a qualitative approach through the method of policy content analysis (content policy analysis). The results of this study indicate that the analysis of existing learning policies in the Universitas Brawijaya Vocational Education Program during the pandemic and post-pandemic transition (preparation) can be categorized with an incremental policy model approach. The learning policy model in the Vocational Education Program Universitas Brawijaya in the form of theory, practice and internship learning is found that the dynamics of policy products at the macro, meso and micro levels are made incrementally. This shows results that are often adequate in the context of limited resources, but changes will occur quickly when situations and conditions that demand change are found. As a consequence, learning is faced with less than optimal quality. In an incremental perspective, changes in the context of adapting to the pandemic period face unpreparedness in the transition to digital and distance learning. This study recommends the existence of a policy model for vocational higher education learning with holistic and democratic dimensions, one of which is by using a deliberative (collaborative) policy model approach.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model kebijakan pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi pasca pandemi Covid-19. Tantangan atas kebijakan pembelajaran ke depan harus mampu mengadaptasi kebiasaan baru dalam proses pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang khas dengan teknologi terapan yang berbasis skill dan kompetensi dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, khususnya bagi sivitas akademika. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis konten kebijakan (content policy analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan existing pembelajaran pada Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya pada masa pandemi dan transisi (penyiapan) pasca pandemi dapat dikategorikan dengan pendekatan model kebijakan inkremental. Model kebijakan pembelajaran di Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya dalam bentuk pembelajaran teori, praktik dan magang didapati bahwa dinamika produk kebijakan baik tataran makro, meso

¹Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: romy@ub.ac.id

²Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: mdanielseptian@ub.ac.id

³Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: hayat@unisma.ac.id

dan mikro yang dibuat secara incremental. Hal ini menunjukkan hasil yang acapkali memadai dalam konteks keterbatasan sumberdaya namun akan terjadi perubahan yang cepat pula manakala didapati situasi dan kondisi yang menuntut perubahan. Sebagai konsekuensi bahwa pembelajaran dihadapkan pada kualitas yang kurang optimal. Dalam perspektif inkremental, perubahan dalam rangka adaptasi masa pandemi menghadapi ketidaksiapan dalam peralihan pembelajaran digital dan jarak jauh. Penelitian ini merekomendasikan adanya model kebijakan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi berdimensi holistik dan demokratis, yang salah satunya dengan menggunakan pendekatan model kebijakan deliberatif (kolaboratif).

PENDAHULUAN

Situasi krisis pada kehidupan masyarakat global akibat mewabahnya penyakit *novel coronavirus* (nCov-19 / Covid-19) berdampak pada masyarakat tidak terkecuali sivitas pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Sejak diumumkannya oleh World Health Organization (2020) atas situasi kemudian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) pada Februari 2020, penyelenggaraan pendidikan di Indonesiapun harus dituntut secara cepat merespon dan beradaptasi dengan kondisi tersebut. Secara kebijakan, Pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan diterbitkannya produk kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada 31 Maret 2020. Selain itu, disaat yang sama Pemerintah menyadari bahwa sebagai upaya penanggulangan mewabahnya penyakit Covid-19 dengan memutus mata rantai penyebaran yang diantaranya melalui pembatasan aktifitas dan mobilitas manusia. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corono Virus Disease 2019* (Covid-19) meliputi diantaranya bahwa ketentuan peliburan sekolah dan tempat kerja (Ps.4). Artinya dampak secara eksplisit bahwa peniadaan proses belajar mengajar di mana pertemuan pada perguruan tinggi tak luput dari konsekuensi atas penerapan kebijakan tersebut.

Konsekuensi atas kebijakan makro tersebut termuat pula pada peraturan pelaksana lainnya dengan menekankan pada penerapan substansi kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*. Hal ini tentu berdampak pada bagaimana proses interaksi pembelajaran klasikal di mana antara pendidik (dosen) dan peserta didik (mahasiswa) dalam suatu ruangan secara klasikal yang harus adanya perubahan pada pola penyelenggaraan pendidikan dari jenjang dasar sampai tinggi (Simatupang & Yuhertiana, 2021). Sedangkan secara spesifik atas dampak pada pendidikan tinggi jenis vokasi, disebutkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi covid-19 berdampak pada aspek pengembangan *hard skills* dan *softskills* peserta didik pada pendidikan vokasi di mana diketemui adanya hambatan, kesulitan, dan kekurangan serta ketidakefektifan dalam proses pembelajaran (Mukarromah & Wijayanti, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperbaiki kebijakan dalam menyusun pembelajaran yang lebih komprehensif melalui studi dan perbaikan model kebijakan yang menjadi rujukan pembelajaran sehingga menjadi lebih baik pasca pandemi (Handyani, et al., 2020; Noori, 2021; Joko, et al., 2021).

Aktualisasi kebijakan baru yang adaptif dalam penyelenggaraan pembelajaran memerlukan pendekatan model kebijakan yang holistik dan implementatif. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berdampak pula bahwa sektor pendidikan memerlukan kebijakan yang adaptif dalam merespon pandemi Covid-19 khususnya saat pasca pandemi di mana kebijakan pembukaan sekolah (*school reopening*) mulai diterapkan (Bappenas, 2021). Hal ini dikarenakan bahwa implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan skema Belajar Dari Rumah (BDR) berpotensi pada penurunan kualitas hasil belajar (*learning loss*), angka putus sekolah, dan tidak kalah penting timbulnya problem kesehatan mental serta penurunan *student wellbeing*. Sementara itu *International Commission on the Futures of Education* (2020) juga memberikan pandangan bahwa pandemi kesehatan secara global menyebabkan setidaknya 1,5 miliar peserta didik harus terhambat yang

disebabkan ketidaksetaraan, kelemahan, dan kerentanan proses pendidikan yang diantaranya ketidaksiapan akan pembelajaran digital dan jarak jauh.

Secara empiris situasi dan kondisi atas mewabahnya Covid-19 memiliki dua sisi baik dalam perspektif baik dan buruk. Watkinson (2020) menyebutkan bahwa Covid-19 telah mengkatalisasi masyarakat dalam adopsi teknologi digital. peningkatan komitmen yang berfokus keadilan sosial; dan memberikan dorongan baru dalam pemanfaatan internet dalam berbagai model dan format kepentingan. (Kaplan & Haenlein, 2016) menyebutkan bahwa praktik *distance learning* berbasis online berbentuk penyampaian materi pedagogik kepada peserta didik dipisahkan (secara fisik) dengan jarak yang memungkinkan partisipasi tanpa batas dengan segala perencanaan dan penyiapan dalam lanskap pendidikan. Oleh karenanya kekhasan pembelajaran yang dimiliki oleh pendidikan tinggi vokasi juga telah mengalami tantangan dan sekaligus penyesuaian terhadap kebijakan Covid-19. Artinya dalam situasi apapun, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi harus tetap menjadi komponen penting dalam mewujudkan *link & match* terhadap Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA). Pendidikan Vokasi pada Perguruan Tinggi menuntut ekspektasi model kebijakan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan *soft skill* dan *hard skill* serta *attitude* yang juga terus berkembang. Hal ini karena lulusan Pendidikan Vokasi diharapkan mampu produktif dan profesional dalam Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).

Kebijakan sebagai sebagai salah satu instrumen penting pemerintah memiliki andil strategis dan besar dalam adaptasi situasi situasi yang yang tidak menentu (*uncertainty*) dan tantangan era disrupsi saat ini dalam pengaturan dan pengelolaan pendidikan. Namun dari penelitian terdahulu belum banyak yang menjelaskan secara spesifik dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pembelajaran pendidikan tinggi vokasi dari aspek dan pendekatan proses kebijakan. Penelitian ini untuk mengkaji bagaimana model kebijakan pembelajaran pasca pandemi pada Pendidikan Tinggi Vokasi. Bullock dan Stallaybrass (1997); Dye (1978) dalam (Wahab, 2008) menyakini bahwa model merupakan upaya representasi, penyederhanaan dalam bentuk desain tertentu atas suatu realita politik dengan tujuan tertentu. Thomas R. Dye dalam (Wahab, 2008)

menyebutkan bahwa model kebijakan publik ada enam, yaitu Model Kelembagaan, Model Kelompok, Model Elit, Model Rasional, Model Inkremental dan Model Sistem. Sedangkan model Inkremental memiliki tipologi dan cara pandang kebijakan sebagai perubahan kecil-kecilan dari kebijakan- kebijakan sebelumnya. Charles Lindblom sebagai penggagas model inkremental berpandangan bahwa dalam situasi dan waktu serta sumber daya yang terbatas menuntut pembuat kebijakan untuk tidak mengidentifikasi alternatif kebijakan secara komprehensif.

Pendekatan inkremental terlihat bagaimana model kebijakan pembelajaran yang tergolong ragam kebijakan distributif (*distributive policies*) sejak pemberlakuan kebijakan pendidikan pada awal masa darurat hingga masa pandemi dan pasca (penyiapan) pandemi Covid-19. Surat Edaran Menteri, Keputusan Bersama Empat Menteri dan Imbauan yang berkaitan dengan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran dan Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) sejak bulan Maret hingga medio September-November 2020 dari mulai skema Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/ jarak jauh dan pembelajaran tatap muka..

METODE

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*post positivism*) melalui metode konten analisis (*content analysis*). Sumber data primer dilakukan dengan wawancara (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD); sedangkan data sekunder dengan menelaah konten dari Dokumen, Laporan, dan Lembar kebijakan / SOP serta Dokumen terkait lainnya. Wawancara secara mendalam terhadap *stakeholders* model kebijakan pembelajaran pendidikan vokasi di Perguruan Tinggi Vokasi; observasi partisipan dan non partisipan; dan *focus grup discussion* (FGD). Sedangkan tahapan penelitian ini diantaranya: melakukan identifikasi data secara lebih mendalam terhadap problem, melakukan identifikasi dan melakukan *crosscheck* data, lebih melalui wawancara

maupun observasi, menghimpun data yang telah dikumpulkan berdasarkan fokus penelitian, melakukan analisis data, dan penarikan kesimpulan. Lokus penelitian pada Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya (PV UB) yang beralamat di Jl Veteran No 12 – 14, Ketawanggede, Malang, Jawa Timur, Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan kedaruratan kesehatan akibat mewabahnya Coronavirus Disease (Covid-19) baik melalui kebijakan di tingkat dunia pada Februari 2020 (WHO, 2020) maupun Pemerintah Republik Indonesia pada Maret 2020 (Keppres 11/2020) menyebabkan situasi krisis multidimensi di berbagai sektor. Salah satu sektor yang harus segera menyesuaikan adalah sektor pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang merupakan amanat undang-undang, menuntut layanan pendidikan harus tetap berjalan dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai konsekuensi, pengaturan pembelajaran (*learning*) di mana merupakan inti dari pendidikan harus dilakukan melalui berbagai bentuk dan tingkatan kebijakan pendidikan dibuat untuk merespon tersebut. Dalam perkembangannya pelaksanaan kebijakan pembelajaran situasi yang masih belum siap, ragam kendala teknis non teknis bahkan tidak efektif. (Prastiko & Supriyanto, 2020; Utomo & Mahmudah, 2021). Kondisi darurat pandemi Covid-19 mengharuskan pembatasan sosial sehingga kebijakan pembelajaran yang secara umum berbentuk proses belajar mengajar tatap muka di ruang-ruang kelas berganti dengan kegiatan belajar dari rumah (BDR).

Peranan kebijakan (regulasi) dalam bentuk pedoman pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sudah dilakukan pemerintah secara dinamis dan adaptif. Pengejawantahan pembatasan sosial dalam bidang pendidikan melalui skema pembelajaran sebagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya sebagai satu-satunya komponen penyelenggara pendidikan vokasi di Universitas Brawijaya mengacu pada turunan kebijakan dalam konteks penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi serta regulasi internal yang berlaku di lingkungan Universitas Brawijaya. Suatu penyelenggara Pendidikan Tinggi dalam bentuk perguruan tinggi vokasi merupakan amanat sekaligus salah satu komponen sebagaimana Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Prinsip dasar atas Program dan Proses vocational school menitik beratkan pada kompetensi. Sebagaimana (Miller, 1984) bahwa prinsip program pendidikan vokasi sebagaimana (Miller, 1984) antara lain: a) kurikulum Pendidikan vokasi merupakan turunan/derivasi dari kebutuhan dalam dunia kerja, b) jenis pekerja merupakan basis/dasar pengembangan kurikulum pendidikan vokasi, c) inovasi merupakan bagian dari pendidikan vokasi, dan d) melalui pendidikan vokasi, peserta didik dipersiapkan untuk awal memasuki dunia kerja. Sedangkan untuk prinsip dasar proses dalam pendidikan vokasi menurut (Miller, 1984), yaitu: a) peran serta masyarakat (dunia kerja) merupakan bagian yang menentukan dalam menyusun program pendidikan vokasi, b) artikulasi dan koordinasi merupakan bagian pokok dalam pendidikan vokasi, dan c) penilaian (evaluasi) dilakukan secara terus menerus.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa sindrom pernafasan akut dalam bentuk penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia akan memiliki umur panjang di berbagai negara. Transisi kondisi atas Covid-19 dari pandemi menuju endemi akan diprediksi terjadi dengan sejumlah kriteria dan dinamika penanganan yang ada. Endemi di mana dapat diartikan pasca kedaruratan Covid-19 sehingga kondisi saat di mana bukan kembali normal sepenuhnya sebagaimana kondisi kehidupan masyarakat seperti sebelum terjadinya wabah *pagebluk* Covid-19. Kondisi dan situasi pemodelan kebijakan pembelajaran vokasipun juga akan dituntut adaptif dan inovatif. Pendidikan tinggi vokasi identik dengan kebijakan proses belajar mengajar berbasis praktikum, *teaching industry* (di mana Industri melakukan *cross learning*, antara di industri dan perguruan tinggi vokasi) dan magang / *on job training* pada mitra IDUKA.

Hal ini sebagaimana (Andhika, 2019) bahwa pemodelan kebijakan mesti dilakukan dengan input yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, sektor, dan lembaga dalam kerangka kerja sistem yang kompleks dengan tambahan berupa pengungkapan dampak kebijakan dalam skala besar secara adaptif.



Gambar. 1. Focus Group Discussion Peneliti dan Informan
Sumber: Peneliti (2021)

Berpijak dari perihal tersebut, sudut pandang pemodelan kebijakan telah peneliti gunakan dalam menganalisis konten kebijakan yang telah ada (eksisting) pendidikan tinggi vokasi guna menyesuaikan dengan situasi yang serba tidak pasti (*uncertainty*) akibat krisis multidimensi Covid-19. Namun teori dasar kebijakan menyebutkan, bahwa kebijakan merupakan seperangkat bentuk sikap baik *political action* maupun *administrative action* sehingga respon pemerintah sangat diperlukan dalam konteks evaluasi, eksisting maupun merencanakan suatu *forecasting*. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan tetap menjaga protokol kesehatan jika Mahasiswa sudah menjalani vaksinasi tahap dua dibuktikan dengan bukti telah melakukan vaksinasi. Sebagaimana hasil wawancara bahwa :

“Penerapan luring (tatap muka) pada beberapa program studi belum menerapkan kebijakan tersebut. Pembatasan akan Jumlah kapasitas kelas sebelum pandemi berjumlah 60 Mahasiswa dalam satu kelas. Setelah kebijakan ditengah pandemi jumlah mahasiswa kuliah tatap muka dibatasi berjumlah 30 Mahasiswa.”

Kebijakan dalam pendidikan khususnya kebijakan pembelajaran di pendidikan tinggi vokasi juga memerlukan pemodelan kebijakan yang tepat walau dengan dan di tengah kondisi yang serba dinamis seperti saat ini sehingga upaya menjawab tantangan *loss learning* atas penyediaan sumber daya manusia lulusan pendidikan vokasi dapat diminimalisir.

Secara umum proses belajar mengajar pada Program Pendidikan Tinggi Vokasi Universitas Brawijaya masih dilaksanakan secara daring/*online* sehingga proses pembelajaran secara luring masing belum dilaksanakan sampai saat ini. Kegiatan perkuliahan di Vokasi Universitas Brawijaya meliputi proses belajar mengajar, bimbingan, kuliah kerja/praktik lapangan, magang, ujian tugas akhir, dan/atau bentuk kegiatan perkuliahan lainnya tahun akademik 2021/2022 dilakukan secara daring. Hal ini sesuai dengan surat edaran Rektor nomor 6237/UN10/TU/2021 masih dilakukan secara daring. Sebagaimana yang dikemukakan tenaga kependidikan PV UB Mohammad Bisri (Koordinator Sub Urusan Akademik dan Kemahasiswaan) bahwa:

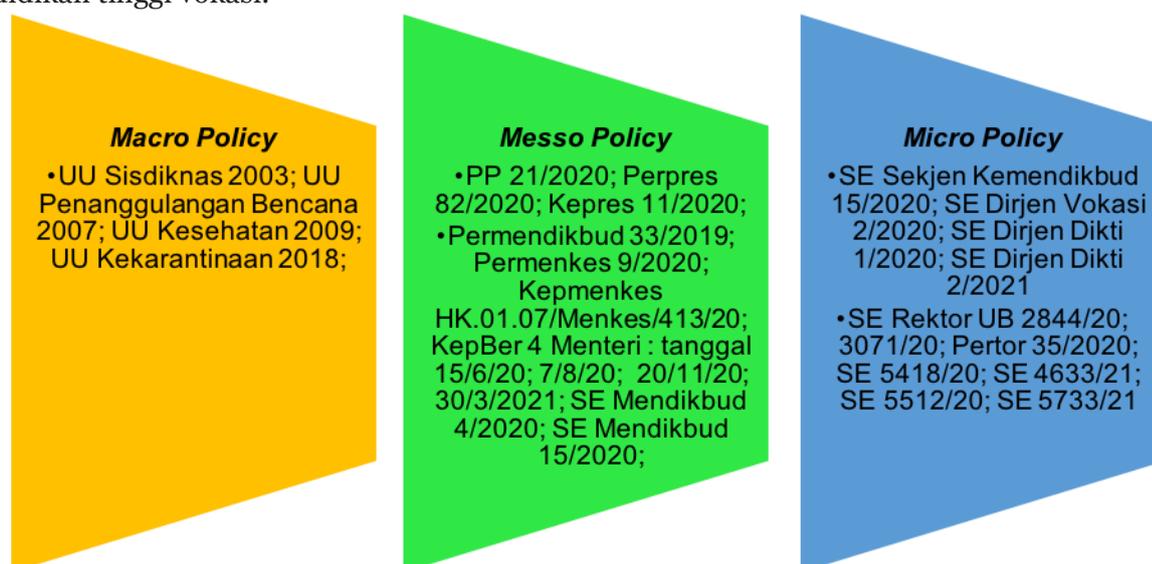
“Faktor kegiatan akademik dan mahasiswa dilakukan secara daring adalah atas pertimbangan masih tingginya kasus covid-19 di wilayah Malang Raya dan masih diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Malang Raya”

Adapun sebagai upaya penyediaan implementasi kebijakan perkuliahan tatap muka terbatas telah dilakukan. Universitas Brawijaya dan Program Pendidikan Vokasi telah mempersiapkan kebijakan perkuliahan akademik secara luring atau proses tatap muka (PTM). Pemberlakuan

kegiatan akademik dan kemahasiswaan secara luring dilaksanakan dan berlaku apabila kasus covid-19 di Malang Raya sudah menurun dan PPKM sudah level 1. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam wawancara bersama Sovia Rosalin, A.Md., S.AP., M.AB. (Ketua Program Studi Administrasi Bisnis) bahwa

“Selama pandemic Covid-19, proses pembelajaran dan kegiatan mahasiswa diatur dan ditentukan oleh Vokasi UB dibawah koordinasi Ketua Program Studi tanpa mengurangi kreativitas dan keaktifan mahasiswa, seperti magang/PKL mahasiswa di mitra DUDI dikoordinasikan oleh KPS.”

Temuan dari penelitian ini bahwa model kebijakan di lingkungan Universitas Brawijaya khususnya pada Program Pendidikan Vokasi UB melaksanakan kebijakan pembelajaran dengan mempedomani model kebijakan berjenjang baik pendektan *macro*, *messo* dan *micro policy* (Nugroho, 2017). Sebagaimana bagan di bawah ini menjelaskan jenjang kebijakan pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi.



Adapun secara konten, substansi pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional (micro) dalam perpektif pemodelan kontinentalis memuat ruang lingkup kebijakan baik macro maupun messo. Regulasi normatif bahwa Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya (UB) setidaknya mengacu secara umum pada sistem pendidikan nasional dan pendidikan tinggi. Secara teknis, Program Pendidikan Vokasi UB pada ruang lingkup kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan berpedoman aturan teknis pada Direktorat Pendidikan Tinggi karena bagian dari Universitas Brawijaya dan Direktorat Pendidikan Vokasi karena penyelenggara pendidikan vokasi. Konteks pembelajaran dalam situasi wabah, sehingga domain kesehatan menjadi vital karena menyangkut keberlangsungan pembelajaran secara sehat. Regulasi dan rekomendasi pemangku kesehatan menyebutkan bahwa pembelajaran ke depan dilakukan dengan jaga jarak satu sama lain, kegiatan pembelajaran yang mulanya dilakukan dengan tatap muka, kemudian berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring. Hal ini sesuai dengan aturan khusus dalam produk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang berkembang dalam bentuk dan pelaksana peraturan lainnya.

Sedangkan konteks konten kebijakan lainnya, diketemukan bahwa kebijakan pembelajaran yang dibuat dapat dinilai dalam pendekatan incremental. Adanya perubahan secara cepat baik dalam tuntutan perbaikan maupun merespon situasi dan kondisi secara sosiologis. Sebagaimana (Wahab, 2008) bahwa pada umumnya para pembuat kebijakan terdorong dalam model inkremental secara natural sejalan dengan sikap pragmatis manusia di mana adanya upaya

untuk menemukan cara terbaik (the best way) akan diakhiri manakala didapati cara yang dapat akan segera dilaksanakan (workable). Hal ini dapat teramati dengan aturan regulasi yang sangat dinamis regulasi darurat covid-19 (periode Maret-Juli) di mana pengaturan mekanisme proses belajar mengajar menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh, melakukan pembelajaran dari rumah dengan pembelajaran daring baik synchronous maupun asynchronous, melalui berbagai platform yang secara eksplisit terkhusus bagi peserta didik di wilayah Malang (SE Dirjen Pendidikan Tinggi 1/2020). Sementara kebijakan operasional menindaklanjuti melalui SE Rektor UB 3071/UN10/HK.05.4/2020 pada tanggal 26 Maret 2020 memberikan ketetapan akan seluruh kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara daring sampai dengan akhir semester genap TA 2019/2020.

Proses perbaikan secara incremental dapat dilihat pada kebijakan bulan Juni hingga November 2020 hingga Maret 2021. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 di mana Penerapan Prokes dengan adanya penerapan konsepsi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diterbitkan 13 Juli 2020 kemudian tidak berselang lama dengan adanya revisi Keputusan Bersama 4 Menteri dari sebelumnya tertanggal 15 Juni 2021 menjadi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ pada tanggal 7 Agustus 2020 dan direvisi (dicabut) kembali pada 20 November 2020 Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini sebagaimana Furtado (2019) bahwa model kebijakan syarat dengan kompleksitas metodologi sains dalam kebijakan publik sehingga memerlukan penerapan metodologi ilmu yang kompleks yang bersifat interdisipliner.

Dalam konteks masa pasca (penyiapan) pandemi Covid-19, bahwa penyiapan kebijakan pembelajaran dengan skema baru juga dibentuk dengan perbaikan perbaikan maupun merespon situasi dan kondisi secara sosiologis dalam incremental model policy approach. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021; Nomor 384 Tahun 2021; Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021; Nomor 440-717 Tahun 2021 pada tanggal 30 Maret 2021 yang ditindaklanjuti melalui SE Dirjen Dikti Ristek 4/2021 pada tanggal 13 September menetapkan bahwa Penyelenggaraan Pembelajaran Atap Muka Tahun Akademik 2021/2022 menggunakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan/atau Pembelajaran Daring. Pendekatan perubahan secara cepat atas respon dan dinamikan juga terjadi pada bahwa regulasi operasional pembelajaran di lingkungan Universitas Brawijaya dengan dicabut Surat Edaran Rektor Nomor 5733/UN10/TU/2021 tertanggal 11 Juni 2021 di mana perkuliahan Luring (Pembelajaran Tatap Muka) bagi mahasiswa semester 3 dan mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir serta praktikum luring harus dicabut dan dibatalkan dan diganti dengan Surat Edaran Rektor Nomor 6237/UN10/TU/2021 tertanggal 30 Juni 2021 bahwa perkuliahan (pembelajaran) T.A 2021 secara daring sementara praktikum dapat luring. Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Rektor Nomor 18/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya 2021/2022. Di mana muatan substansi terdapat Kalender Akademik dan Buku Pedoman Akademik yang meliputi Outcome Based Learning (OBE); Merdeka Belajar dan; Pedoman Pembelajaran Bauran (Blended Learning) dan Daring (online). Analisis pemodelan kebijakan sebagaimana Estrada (2011) sebutkan bahwa analisis pemodelan kebijakan digunakan untuk mengevaluasi masa lalu (konteks penyebab) dan masa depan (konteks akibat) dari setiap kebijakan publik dalam ragam ruang dan waktu. Artinya dalam menentukan pemodelan kebijakan dipengaruhi oleh kebijakan yang telah lalu yang dalam konteks riset ini adanya perubahan kecil-kecil, sehingga incremental dilakukan tidak hanya dikarenakan keterbatasan sumberdaya (waktu, informasi, dana) melainkan juga faktor keberhasilan yang dicapai sebelumnya

SIMPULAN

Upaya pembangunan sumberdaya manusia dengan mengedepankan kematangan profesionalisme, intelektual dan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan tinggi vokasi memerlukan seperangkat kebijakan publik dan kebijakan pendidikan. Pengelolaan kelembagaan yang profesional dan kompetensi alumni yang mumpuni merupakan kinerja utama dalam pengembangan pendidikan tinggi. Pemodelan kebijakan pembelajaran pendidikan pada perguruan tinggi vokasi di Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya menggunakan pendekatan model kebijakan incremental. Hal ini diterapkan secara tingkatan kebijakan pembelajaran mengacu pada tingkatan kontinentalis kebijakan macro, meso, dan micro dimana pedoman pembelajaran berupa undang-undang, peraturan eksekutif, peraturan pelaksana eksekutif dan peraturan pelaksana di tingkat internal. Konteks content analysis model kebijakan pembelajaran didapati model kebijakan inkremental atas kebijakan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi masih belum optimal yang disebabkan masih lemahnya aktualisasi prinsip mitigasi yang memastikan baik secara prinsip maupun teknis. Hal ini diperlukan upaya demokratisasi dalam bentuk keterlibatan publik sivitas akademika (public involvement) dan dinamika policy inconsistency dalam menentukan model kebijakan pembelajaran pasca pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2019). PEMODELAN KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN DAN ANALISIS UNTUK RISALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH. *JURNAL RISET PEMBANGUNAN*, 2(1), 22–35.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2016). Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster. *Business Horizons*, 59(4), 441–450. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.03.008>
- Miller, M. D. (1984). *Principles and a philosophy for vocational education*.
- Mukarromah, U., & Wijayanti, W. (2021). Implementation of the online learning at vocational high school during Covid-19: Between obligations and barriers. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 11(1). <https://doi.org/10.21831/jpv.v11i1.37110>
- Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Prastiko, M. N., & Supriyanto, A. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Seminar Nasional Arah Manajemen Sekolah Pada Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19*.
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30–38. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.230>
- Utomo, R. A. S., & Mahmudah, F. N. (2021). The Implementation of Distance Learning during the Covid-19 Pandemic. *Madrasah*, 13(2), 114–125. <https://doi.org/10.18860/mad.v13i2.11330>
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Malang: UMM press.
- WHO. (2020). *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 94*.